

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM.69 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN,
 PENETAPAN KINERJA DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

FORMAT FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Format Rencana Kinerja Tahunan Tingkat Kementerian Perhubungan

Kementerian : (a)

Tahun : (b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Petunjuk Pengisian:

1. *Header* (a) diisi nama Kementerian.
2. *Header* (b) diisi dengan tahun anggaran.
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis kementerian sesuai dengan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.
4. Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja atas sasaran strategis dari Kementerian dalam kolom (1).
5. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

**B. Format Rencana Kinerja Tahunan Tingkat Unit Organisasi Eselon I _____ di
Lingkungan Kementerian Perhubungan**

Unit Organisasi Eselon I : (a)

Tahun : (b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Petunjuk Pengisian:

1. *Header* (a) diisi nama Unit Organisasi Eselon I Kementerian Perhubungan;
2. *Header* (b) diisi dengan Tahun Anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Unit Organisasi Eselon I sesuai dengan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;
4. Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja atas sasaran strategis dari Unit Organisasi Eselon I dalam kolom (1);
5. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

C. Format Rencana Kinerja Tahunan Tingkat Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Unit Organisasi Eselon II : (a)

Tahun : (b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Petunjuk Pengisian:

1. *Header* (a) diisi nama Unit Organisasi Eselon II Kementerian Perhubungan;
2. *Header* (b) diisi dengan Tahun Anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Unit Organisasi Eselon II sesuai dengan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;
4. Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja atas sasaran strategis dari Unit Organisasi Eselon II dalam kolom (1);
5. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA,

E.E.MANGINDAAN

LAMPIRAN I I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM.69 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN,
 PENETAPAN KINERJA DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

FORMAT PENETAPAN KINERJA

A. FORMAT PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

1. Format Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat Kementerian Perhubungan

(Lambang Kementerian Perhubungan)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN.....

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Pada Tahunini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, **tgl-bln-thn**

.....

(Nama Jelas)

2. Format Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat Unit Organisasi Eselon I/ Eselon II/ Unit Kerja Mandiri / UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan

(Lambang Kementerian Perhubungan)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN.....

----- (NAMA UNIT KERJA) -----

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :

Jabatan :

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada Tahun.....ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari Perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

....., tgl-blh-thn

PIHAK KEDUA,
Nama Jabatan

PIHAK PERTAMA,
Nama Jabatan

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

C. FORMAT LAMPIRAN FORMULIR PENETAPAN KINERJA

1. Format Lampiran Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Kementerian Perhubungan

Kementerian : (a)

Tahun Anggaran : (b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah **Anggaran Tahun.....: Rp.....(c)**

Jakarta, **tgl-bln-thn**

Menteri Perhubungan

(Nama Jelas)

Petunjuk Pengisian:

1. *Header* (a) diisi dengan Nama Kementerian Perhubungan.
2. *Header* (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan.
3. Kolom (1) diisi dengan Sasaran Strategis Kementerian sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.
4. Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja yang relevan untuk mengukur Sasaran Strategis K/L sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan ataupun berdasarkan penetapan IKU.
5. Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan, akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
6. Kolom (4) diisi dengan nama program yang digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi Kementerian Perhubungan;
7. Kolom (5) diisi jumlah atau nilai pagu anggaran pada program sesuai dengan kolom (5).
8. *Footer* (c) diisi dengan Total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

2. **Format Lampiran Formulir Dokumen Penetapan Kinerja Tingkat Unit Organisasi Eselon I/Eselon II/ Unit Kerja Mandiri /Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan**

Unit Organisasi Eselon I : (a)

Tahun Anggaran : (b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Jumlah Anggaran:

Program.....: Rp.....(c)

Jakarta, tgl-bln-thn

Menyetujui,

Menteri Perhubungan

Kepala

--- Nama Unit Kerja Es I ---

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Petunjuk Pengisian:

1. *Header* (a) diisi dengan Nama Unit Organisasi Eselon I.
2. *Header* (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan.
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Eselon I /sasaran kegiatan utama sesuai dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah.
4. Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dari Unit Organisasi Eselon I sesuai dengan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah ataupun berdasarkan penetapan IKU.
5. Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
6. *Footer* (c) diisi dengan Total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E.MANGINDAAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM.69 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN,
PENETAPAN KINERJA DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

A. KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai Pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

B. *EXECUTIVE SUMMARY* (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja.

C. BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran singkat mengenai Unit Kerja yang melaporkan dan sekilas Pengantar lainnya (misalnya kedudukan, tugas dan fungsi, dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun yang bersangkutan).

D. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN XXXX

Dalam Bab II ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) terkait:

1. Visi dan Misi Kementerian sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Rencana Strategis.
2. Tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Unit Kerja yang memuat uraian dari tujuan dan sasaran pada tahun yang bersangkutan, dan faktor-faktor lainnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (sesuai dengan periode Rencana Strategis). Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang menjelaskan mengenai cara yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam bentuk program dan kegiatan beserta Indikator Kinerja Utama yang digunakan.

E. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab III ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Unit Organisasi, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi Kinerja dimulai dengan Pengukuran Kinerja yang mencakup Penetapan Kinerja dan Pencapaian Kinerja.

Analisis Pencapaian Kinerja menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja Unit Kerja, menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan dan hambatan/kendala yang dihadapi

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dalam hal ini dapat dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan tersebut.

Aspek Keuangan menguraikan sumber perolehan dan penggunaan dana bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja. Aspek Keuangan harus memperhatikan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang lazim.

F. BAB IV PENUTUP

Tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan, dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan.

G. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Untuk memperjelas Laporan Akuntabilitas Kinerja, dapat dilampirkan perhitungan-perhitungan, gambar-gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, dan data lain yang relevan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM.69 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN,
PENETAPAN KINERJA DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

HALAMAN SAMPUL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

(Lambang Kementerian Perhubungan)	
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (nama Unit Kerja) TAHUN	} Arial 16 pt
(nama unit kerja) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (bulan, tahun)	} Arial 14 pt

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN